

MENGUNGKAP TINDAK KEKERASAN DI IPDN DAN USAHA PENANGGULANGANNYA

Suwanto Adhi ¹⁾

Agus Naryoso ²⁾

Abstract

Violence which took place in IPDN from years to years will never really be revealed something hidden by the IPDN authority home affair departement.

There are choices to finish the problems on IPDN. First, exchange the rector and lecture who involved in every incidence in IPDN with the new one. Second, freeze IPDN institution for at least 4 years, so that during that time IPDN won't be allowed to accept any new students before new curriculum is evaluated by the government.

Key Word : Evaluation, Strategic and Public Government.

A. PENDAHULUAN

Sebuah Lembaga Pendidikan harusnya memberikan contoh nyata kepada masyarakat maupun kepada anak didiknya, bahwa adanya rasa tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan kepada lembaga pendidikan tersebut. Institut pemerintahan dalam negeri (IPDN) adalah salah satu lembaga pendidikan tinggi kedinasan dalam lingkungan departemen dalam negeri dengan maksud untuk mempersiapkan kader pemerintahan dalam negeri yang siap tugas dan siap dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan yang baik bukan sebagai kampus pencetak kader pemerintahan yang citranya menjadi sebuah lembaga yang didalamnya banyak terjadi tindakan kriminal/kekerasan, maupun bentuk penyimpangan lainnya.

Dewasa ini citra masyarakat sudah sangat negatif kepada IPDN sehingga perlu koreksi diri dan menahan diri untuk tidak melakukan lagi hal-hal yang bersifat negatif. Seharusnya yang diperoleh dari kader IPDN adalah kader pengawal negara, menjaga hubungan strata pemerintahan, tetapi juga menyayangi masyarakat, menjadi guru masyarakat, juga dimensi kemanusiaan bukan kader yang penuh kekerasannya. Dari sinilah Good Governance itu harus dibangun.

Kekerasan di IPDN dianggapnya merupakan gejala biasa yang terjadi, hal ini merupakan budaya yang cenderung otoriter dan penyebab langsung adanya ketidaktegasan pengasuh, pengurus, maupun pemerintah yang memegang otoritas pendidikan di lembaga tersebut (**Pikiran Rakyat : 7 Juni 2007; hal 7**)

Kekerasan di IPDN, mungkin bukan

berindikasi konflik kalau ada usaha penelitian yang mendalam, mulai dari fakta yang ada seperti yang telah terungkap secara perlahan. Kasus kekerasan itu jelas jauh dari prinsip hak asasi manusia, maka pemerintah harus benar – benar menuntaskan masalah yang ada di IPDN tersebut.

Dalam rangka untuk mengambil kebijakan yang tepat dalam hal kelanjutan dari kekerasan di IPDN maka pemerintah melakukan investigasi oleh tim independen. Tim ini memberikan laporan kepada pemerintah atas investigasinya di IPDN. Semua pihak, baik jajaran departemen, termasuk para orang tua maupun masyarakat, kiranya dapat memahami bahwa upaya perbaikan sedang dilakukan dan terus diperbaiki. Kita juga harus hening dalam melihat permasalahan, baik dari dimensi hukum maupun penyelesaian secara visual. Termasuk juga secara sistem yang sedang dievaluasi untuk di rekomendasikan oleh tim evaluasi yang dibentuk presiden pasca peristiwa Cliff Muntu dan ungkapan dari Inu Kencana.

Atas dasar uraian diatas maka dalam tulisan ini penulis menganggap perlu untuk mengungkap tindak kekerasan di IPDN dan bagaimana usaha penanggulangannya saat ini.

B. PEMBAHASAN

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) adalah salah satu Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, dengan maksud untuk mempersiapkan kader pemerintahan dalam negeri yang siap tugas dan siap dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan, baik ditingkat daerah maupun ditingkat Pusat secara

1) Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip

2) Pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Undip

berdaya guna dan berhasil guna.

Selama ini terjadi beberapa kasus kekerasan yang mengarah perbuatan kriminal dilakukan oleh beberapa oknum praja IPDN yang menyebabkan kematian sesama praja. Tindak kekerasan tersebut umumnya berupa penganiayaan dari praja senior kepada praja junior dengan dalih pendisiplinan.

Menurut salah seorang dosennya, Inu Kencana Syafie, sejak tahun 1990 sudah ada 35 orang praja yang meninggal dunia, tapi baru 10 kasus yang terungkap (**Inu Kencana Syafie : 2007 ; hal 10**) Beberapa kasus yang terungkap dimedia masa diantaranya :

Kasus terbaru adalah kematian seorang praja tingkat 2, Cliff Muntu, asal Sulawesi Utara pada hari selasa tanggal 3 April 2007, yang mendapat tindak kekerasan dari praja tingkat 3. Sebelumnya kasus kekerasan juga dialami praja Wahyu Hidayat, yang meninggal dunia pada tanggal 3 September 2003 akibat penganiayaan seniornya. Dalam hal ini, 8 orang praja kemudia divonis 10 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sumedang. Kasus lainnya adalah kematian Ery Rahman pada tanggal 3 maret 2000 juga akibat penganiayaan seniornya.

Aliyan Bin Jerani, praja dari Kalimantan Barat yang dilaporkan tewas pada tanggal 8 Juni 1993 akibat terjatuh dari lantai 2 barak Lampung. Namun penyebab kematian ini diragukan oleh keluarganya sekarang, mestipun sebelumnya mereka menerima begitu saja laporan dari pihak IPDN.

Kasus anarkis juga terjadi dalam pertentangan antar kelompok praja, seperti yang terjadi pada tanggal 1 Maret 2005 ketika terjadi aksi saling lempar piring antara sekelompok wasana praja (mahasiswa tingkat IV) dengan sekelompok madya praja (mahasiswan tingkat II). Akibatnya 11 orang praja mengalami luka – luka, dan sempat mendapatkan perawatan di RS. Hasan Sadikin Bandung.

Kekerasan dari praja bahkan juga menimpa mereka yang baru berstatus calon praja, seperti yang dialami oleh Ichsan Suheri asal Nangrow Aceh Darussalam pada tanggal 25 Oktober 2004.

Kekerasan di IPDN berulang kembali dengan korban Yogi Triyat, seorang wasana praja. Yogi hampir buta karena kornea matanya terkena emblem pada topinya yang diambil paksa oleh seorang pengasuhnya. Pada tanggal 16 Juni 2007 Yogi dikirim ke RS Mata Cicendo Bandung, dengan sobekan di kornea mata kanannya.

Konsekuensi kasus kekerasan terakhir adalah kasus kematian Cliff Muntu, Rektor IPDN Prof. Dr. I Nyoman Sumaryadi di non aktifkan dari jabatannya pada tanggal 12 April 2007. Presiden Susilo

Bambang Yudoyono juga menginstruksikan pembenahan IPDN dengan tidak diperbolehkan menerima praja baru untuk tahun ajaran 2007 / 2008 setelah sejumlah pemerintah daerah mengancam untuk tidak mengirimkan praja baru sebelum pembenahan IPDN dilakukan secara tuntas (**diaset dari WWW. Pikiran Rakyat. Cyber. Com tanggal 5 Mei 2007**).

Dari lingkungan IPDN juga terindikasi adanya pelaku pelecehan seksual oleh purnapraja IPDN dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD) IPDN. Isu mengenai terjadinya kasus asusila, demikian menurut sumber tersebut, sudah ramai dibicarakan dikalangan praja dan pejabat IPDN. Bahkan kabarnya pelaku yang berinisial SF itu telah mendapat sanksi berupa penundaan ujiannya.

Namun demikian, tidak ada satupun praja maupun pejabat IPDN yang mau mengungkapkannya. Ketika kedua korban dan orangtuanya usai upacara pelantikan mudapraja IPDN angkatan XVI tahun akademik 2004 / 2005 di kampus IPDN Jatinangor, mereka menolak berbicara.

Selain kasus pelecehan seksual, terungkap pula terjadinya kasus asusila yang dilakukan oleh dua pasangan Indya Praja IPDN di sebuah hotel di kawasan Kemang Jakarta. Mereka berinisial HO, RN, JA, dan YP.

Perbuatan asusila itu dilakukan sekira dua bulan lalu, pada saat keempatnya ijin menginap di luar kampus. Mereka kepergok sedang Check In di sebuah hotel di kawasan Kemang oleh dua orang pengasuhnya. Kasus asusila ini sempat dibawa ke rapat senat IPDN. Senat memutuskan untuk memecat keempat Indya Praja tersebut. Namun pada akhirnya keempatnya hanya diberi sanksi turun pangkat (**Suara Merdeka : 18 April 2007 hal 4**).

Sementara itu, terjadinya aksi pemukulan yang dilakukan oleh pengasuh, kepada muda praja pada bulan Juni 2004 lalu di kampus IPDN. Aksi pemukulan tersebut menimpa seorang muda praja berinisial ICH yang dianggap melanggar disiplin karena berjalan kaki ditempat yang salah.

Dari hasil rekaman pengakuan korban yang diperdengarkan terungkap bahwa, peristiwa pemukulan terjadi pada tanggal 30 Juni 2004 usai sholat subuh. Pemukulan dilakukan oleh pengasuh berinisial BY, yang menganggap korban melanggar disiplin dengan berjalan kaki diatas lapangan rumput.

Korban mengaku dipukul dengan menggunakan telapak tangan didaerah ulu hati dan ditampar pipi kiri dan kanan. Akibat pukulan

tersebut, korban sempat terjatuh karena sesak napas. Menurut korban, praja lainnya banyak yang menyaksikan peristiwa itu, terutama mereka yang baru usai sholat subuh dan mereka yang sedang senam pagi. Korban saat ini sudah naik pangkat menjadi madya praja.

Selain melakukan aksi pemukula, pengasduh yang sama jug amekalukan pelemparan batu ke jendela asrama putri. Berdasarkan pengakuan seorang praja wanita di kaset rekaman yang sama, pelemparan batu itu terjadi pada tanggal 1 Juli 2004 dan mengakibatkan tangan praja wanita terluka terkena pecahan kaca. Hingga saat ini tidak jelas apa motif pelemparan itu.

Pejabat IPDN membantah :

Sementara itu, pelaksana tugas (PLT) Rektor IPDN, Dr. Sudarsono mengatakan, dirinya belum mendengar laporan mengenai adanya kasus pelecehan seksual maupun tindakan asusila yang dilakukan oleh praja IPDN.

Hal senada juga dikatakan oleh Direktur Pasca Sarjana IPDN, Prof. Dr. Sadu Wasistiyono. Sadu mengatakan belum mendengar adanya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh mahasiswa MAPD IPDN, hal ini terjadi karena lembaga IPDN tidak memiliki ketegasan dan kedisiplinan, dan kebiasaan yang melakukan kekerasan merupakan oknum dari praja yang memiliki tabiat yang buruk.

Sementara itu, muda praja asal NAD yang dipukuli seniorinya beberapa waktu lalu, Ichsan Suheri, belum bisa dipastikan dapat kembali masuk ke IPDN atau tidak. Menurut Dr. Sudarsono, Ichsan dianggap tidak mengikuti kuliah tanpa ijin. Karena itu, lanjutnya, pihaknya masih akan mempelajari bagaimana status Ichsan selanjutnya. Kita masih akan pelajari, misalnya bagaimana aturannya bila meninggalkan kampus terlalu lama.

Pasa dasarnya lembaga IPDN sebagaim sekolah tinggi kedinasan yang mendidik kader pamong praja hendaknya bukan saja berubah pada status, lambang nama, dan sistem yang kaku serta tertutup, tetapi juga pada orang – orang yang akan memangku jabatan mulai dari yang rendah sampai dengan yang tertinggi, bersedia menerima nilai, masukan dan paradikma baru.

Sebagai salahsatu sekolah tinggi yang pembahasan utamanya adalah Ilmu Pemerintahan, maka hendaknya IPDN mampu mencetak kader pemerintah yang cerdas intelektual melalui jalur pengajaran, ketrampilan, seni bekerja melalui jalur pendidikan dan pelatihan serta moral kepamongprajaan melalui jalur pengasuhan.

Pola pengasuhan yang menjkadi inti masalah

hendaknya berubah, mereka yang mengerti filsafat pemerintahan secara mendasar sehingga akan terbentuk calon anak bangsa yang berilmu pemerintah. IPDN mampu mengubah image atau persepsi masyarakat yang tadinya kental dengan kekerasan menjadi sekolah sipil yang mampu mencetak kader pemimpin yang handal.

Hal ini menimbulkan persepsi bahwa kekuasaan yang ada di IPDN menggambarkan realitas di masyarakat bahwa kekuasaan di IPDN menggambarkan pemerintah yang bersifat otoriter. Ini akan berdampak kepada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Usaha pemerintah untuk selajutnya adalah melakukan konsolidasi internal di IPDN itu sendiri serta mengadakan perubahan yang bersifat baku, sehingga untuk sementara waktu dapat meredam gejala di IPDN. Sedangkan untuk selanjutnya IPDN diserahkan kepada daerah untuk mengelola prajanya. Sedangkan untuk pendidikan kepamongprajaan di pusat diproyeksikan kepada pegawai yang sudah memiliki karier, sehingga tidak terjadi adanya kekerasan fisik dan mental.

C. PENUTUP

Tindak kekerasan yang terjadi di IPDN dari tahun ke tahun tidak selamanya terkuak dengan sebenar – benarnya. Ada sesuatu yang ditutup – tutupi oleh pihak IPDN dan Departemen Dalam Negeri. IPDN yang pada dasarnya atau seharusnya mencetak pada birokrat yang sanggup, intelektual serta jujur menjadi tidak meyakinkan. Masih dalam pendidikan saja sudah diajarkan tidak benar apalagi setelah menjadi pejabat apalah jadinya negara ini akan dibawa.

Sistem pendidikan yang dilaksanakan di IPDN yang kurang sesuai harus diperbaiki. Tidak hanya sistemnya tetapi juga para pengajarnya yang telah memberikan ijin kepada praja untuk melakukan tindakan kekerasan kepada praja yuniornya. Tidak hanya itu, lembaga yang menaungi IPDN, Departemn Dalam Negeri, juga harus membuka diri terhadap apa yang terjadi di IPDN. Departemen Dalam Negeri dalam menanggapi situasi dirasa sangat tidak rasional. Orang yang jelas – jelas bersalah dibiarkan begitu saja sedangkan orang yang mempunyai etikad baik malah dijatuhi hukuman yang tak seharusnya diberikan.

Apalagi kinerja seorang Rektor yang dipandang sebagai penguasa kampus tidak bekerja sebagaimana mestinya. Beliau malah menutup - nutupi kejadian yang sebenarnya dan memalsukan

penyebab kematian yang sebenarnya. Yang tak habis pikir adalah pengajar takut terhadap prajanya. Hal ini membuktikan kelemahan para pengajar yang kurang bijaksana. Dalam pendidikan biasa (Non Kedinasan) siswa sangat menghormati dosennya tidak ada yang berani berlaku kasar terhadap dosennya.

Meskipun dia bersalah tetapi tidak merasa bersalah, sehingga dalam sistem pendidikan yang diterapkan dalam sifitas akademika IPDN harus menerapkan matakuliah Agama, Kesusilaan, Kesopanan, serta Tata krama. Supaya lulusan dari IPDN mempunyai hati nurani, mempunyai rasa malu

pada diri sendiri dan kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Inu Kencana Syafii; *Maju Tak Gentar Membongkar Tragedi IPDN*; Gema Insani ; Jakarta ; 2007
- Mulyadi; *Seringnya Terjadi Kekerasan di IPDN*; Pikiran Rakyat ; 2007
- Ryaas Rasid; *Kegiatan Akademik Masih Kurang*; Jakarta; 2007
- Suara Merdeka tanggal 18 April 2007
- Websit; Http : // WWW. Pikiran Rakyat . Cyber . Com